ISSN 2252-9144

ETNOREFLIKA

JURNAL SOSIAL DAN BUDAYA
JURUSAN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HALU OLEO
Volume 3, Nomor 2, Juni 2014

Mencandra To Manurung sebagai Peletak Dasar Budaya Politik Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tenggara

Bahasa *Binte*: Bahasa Gaul Kalangan Remaja Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna

Pernikahan di Kalangan Ikhwan dan Akhwat pada Lembaga Wahdah Islamiyah Kendari

Prinsip-prinsip Metodologis dan Organisasi Gramatika Fungsional

Kulidawa, Emas Hijau yang Tergusur

Afiksasi Verba Bahasa Kutai

Dari Gotong Royong ke Pengupahan (Studi Perubahan Sosial Budaya pada Masyarakat Tani di Desa Alosika Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe)

Kajian Budaya Organisasi dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Kerja Pegawai dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Sekretariat Daerah Kota Kendari

Perkelahian Kuda pada Masyarakat Muna

ETNOREFLIKA	Volume 3	Nomor 2	Halaman 496-601	Kendari Juni 2014	ISSN 2252-9144

ETNOREFLIKA JURNAL SOSIAL DAN BUDAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Vol: 3

Jurnal ETNOREFLIKA didedikasikan sebagai sebuah terbitan ilmiah berkala yang diharapkan dapat menjadi ajang pertukaran gagasan dan pemikiran dalam bidang Antropologi, khususnya dan ilmu - ilmu sosial pada umumnya. ETNOREFLIKA hadir dengan misi membangun tradisi dan iklim akademis untuk kemajuan peradaban dan harkat kemanusiaan.

Selain itu, Jurnal ETNOREFLIKA yang secara sengaja mengambil kata generik 'ethnos' yang bertujuan mengemban misi mempromosikan dan mengembangkan semangat multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Reflika dimaknai sebagai proses merefleksikan perilaku, ide dan lingkungannya.

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang bersifat teoritik, hasil penelitian berupa etnografi, dan tulisan—tulisan yang memuat gagasan konstruktif untuk menyelesaikan problem sosial budaya dalam arti luas maupun masalah-masalah pembangunan secara umum, serta tinjauan buku-buku teks antropologi dan ilmu sosial lainnya. Isi artikel tidak harus sejalan dengan pendapat redaksi. Tulisan diketik dengan program MS Word spasi rangkap di atas kertas ukuran A4, dan menyerahkan naskah secara eletronik dan cetak kepada redaksi. Panjang artikel maksimal 5000 kata, dengan mengikuti kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Mohon agar disertakan abstrak maksimal 300 kata, catatan kaki agar dibuat di bagian bawah tulisan dengan urutan nomor. Referensi dibuat menurut abjad nama penulis sesuai dengan contoh tulisan yang ada di edisi ini. Jurnal ETNOREFLIKA terbit tiga kali dalam setahun.

Etnoreflika

JURNAL SOSIAL BUDAYA
VOL.03-NO.02- Juni 2014
ISSN: 2252-9144

Penasihat
Rektor Universitas Halu Oleo

Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo
Ketua Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo

Pemimpin Redaksi
Laxmi, S.Sos., M.A

Dewan Penyunting
Dra. Hj. Wa Ode Sitti Hafsah, M.Si
Dra. Wa ode Winesty Sofyani, M.Hum.
Drs. Syamsumarlin, M.Si
Akhmad Marhadi, S.Sos., M.Si
Dra. Hasniah, M.Si
Hartini, S.Sos., M.Si
La. Janu, S.Sos., M.A.
Ashmarita, S.Sos., M.Si
La Ode Aris, S.Sos., M.A.
Rahmawati, S.Pd., M.A.
Wa Ode Nur Iman, S.Pd., M.Pd.
Fina Amalia Masri, S.Pd., M.Hum

Mitra Bestari
Prof. Dr. H. Nasruddin Suyuti, M.Si (UHO),
Prof. Dr. H. Pawenari Hijang, M.A (Unhas),
Prof. Dr. H. Sulaeman Mamar, M.A. (Untad)
Dr. Lono Lastoro Simatupang, M.A (UGM),
Dr. Nicolas Waroow, M.A (UGM),
Dr. Munsi Lampe, M.A. (Unhas).

Sekretariat
Asril, S.Sos., M.Si
Rabin Musadik
Risnawati, S.Sos
Yusran Saeda

Desain Grafis
Adi, S.Sos
Edo Sanjani
Alham Haidir Darmin
Safri

Penerbit
Laboratorium Jurusan Antropologi
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Halu Oleo

Alamat Redaksi
Jl. H.E, Agus Salim Mokodompit,
Ruang Jurusan Antropologi F I B,
Universitas Halu Oleo, Kendari 93232

PENGANTAR REDAKSI

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat-Nya segala yang kita lakukan dengan kerja keras dapat terlaksana dengan baik. Jurnal Etnoreflika Volume 3 Nomor 2 bulan Juni tahun 2014 telah terbit dengan menyajikan 9 (sembilan) tulisan. Ke sembilan tulisan tersebut merupakan hasil penelitian dari sejumlah dosen dengan berbagai disiplin ilmu, yakni sosial dan budaya yang berasal dari bidang ilmu yang berbeda-beda. Jurnal Etnoreflika Volume 3 Nomor 2, Juni 2014, memuat tulisan sebagai berikut:

- *Mencandra To Manurung* sebagai Peletak Dasar Budaya Politik Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.
- Bahasa *Binte*: Bahasa Gaul Kalangan Remaja Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna.
- Pernikahan di Kalangan Ikhwan dan Akhwat pada Lembaga Wahdah Islamiyah Kendari.
- Prinsip-prinsip Metodologis dan Organisasi Gramatika Fungsional.
- *Kalidawa*, Emas Hijau yang Tergusur.
- Afiksasi Verba Bahasa Kutai.
- Dari Gotong Royong ke Pengupahan (Studi Perubahan Sosial Budaya pada Masyarakat Tani di Desa Alosika Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe).
- Kajian Budaya Organisasi dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Kerja Pegawai dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Sekretariat Daerah Kota Kendari.
- Perkelahian Kuda pada Masyarakat Muna.

Semoga sajian dalam jurnal ini, dapat memberikan kontribusi, informasi maupun wawasan baru dalam bidang sosial dan budaya khususnya di daerah Sulawesi Tenggara.

Salam Redaksi

Volume 3, Nomor 2,
Juni 2014

ETNOREFLIKA

DAFTAR ISI

Rifai Nur	496-503	*Mencandra To Manurung* sebagai Peletak Dasar Budaya Politik Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan
Syamsumarlin **Muh. Sarjono**	504-515	Bahasa *Binte* : Bahasa Gaul Kalangan Remaja Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna
Wa Ode Winesty Sofyani **La Ode Aspin**	516-531	Pernikahan di Kalangan Ikhwan dan Akhwat pada Lembaga Wahdah Islamiyah Kendari
Muh. Yazid Abdul Rahim Gege	532-539	Prinsip-prinsip Metodologis dan Organisasi Gramatika Fungsional
La Ode Topo Jers	540-551	*Kalidawa*, Emas Hijau yang Tergusur
Lilik Rita Lindayani	552-558	Afiksasi Verba Bahasa Kutai
Hasniah **Safri**	559-580	Dari Gotong Royong ke Pengupahan (Studi Perubahan Sosial Budaya pada Masyarakat Tani di Desa Alosika Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe
Sahrun	581-589	Kajian Budaya Organisasi dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Kerja Pegawai dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Sekretariat Daerah Kota Kendari
Akhmad Marhadi **Syawal**	590-601	Perkelahian Kuda pada Masyarakat Muna

ETNOREFLIKA

VOLUME 3 No. 2. Juni 2014. Halaman 496-503

MENCANDRA *TO MANURUNG* SEBAGAI PELETAK DASAR BUDAYA POLITIK SULAWESI TENGGARA DAN SULAWESI SELATAN[1]

Rifai Nur [2]

ABSTRAK

Tulisan jurnal ini diangkat dari disertasi penulis yang berjudul "Otonomi Daerah dan Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaannya di Sulawesi Selatan dan Tenggara Tahun 1950-1959". Salah satu bab dalam disertasi itu membahas mengenai budaya politik dan kemudian diangkat dalam tulisan ini dengan judul "Mencandra *To Manurung* Sebagai Peletak Dasar Budaya Politik Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan". Masalah dalam tulisan ini adalah mengapa *To Manurung* penting sebagai peletak dasar politik budaya masyarakat Sulawesi Tenggara dan masyarakat Sulawesi Selatan. Tujuannya adalah untuk menganalisis mengapa *To Manurung* yang menjadi peletak dasar budaya politik masyarakat di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif tipe strukturis. Pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penyimpulan dan (4) perivikasi data. Hasil penelitian yaitu: (1) etika politik *Sulapa Eppa* yang mewariskan karakter dan gaya kepemimpinan: jujur, penegak kebenaran, pembela keadilan, berani dalam menegakkan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan masyarakat luas; (2) falsafat darah *Takku* darah putih yang menjadikan seseorang tampil sebagai pemberi kebaikan, kedamaian, ketentraman dan kesejahteraan dengan integritas yang tinggi yang mewariskan perilaku memberi tanpa mengambil. Artinya mengambil sesuatu sebagai konsekuensi jabatannya, bukan mengeksploitasi jabatannya untuk mendapatkan sesuatu dari negara dan masyarakat.

Kata Kunci: *To Manurung*, Budaya Politik, Struktur Sosial.

ABSTRACT

This journal article is lifted from the writer's dissertation entitled "Regional Autonomy and Obstacles in Their Implementation in The South and Southeast Sulawesi, 1950-1959". One of the chapters in the dissertation was about the political culture. That chapter was adapted in this paper with the title; Mencandra To Manurung as a foundress of political culture in Southeast Sulawesi and South Sulawesi. The issue in this article is why To Manurung as Foundress of society Cultural politics of Southeast Sulawesi and South Sulawesi. The goal is to analyze why To Manurung became the Foundress political culture Community in Southeast Sulawesi and South Sulawesi. The research method used is descriptive qualitatif strukturis type. Data collection through the study of documentation and interviews. The analysis of the data used are: (1) reduction of data, data presentation (10, (3) a false assertion and perivikasi data. The research result are : (1) political Ethics ' Sulapa Eppa ' who bequeathed the character and style of leadership: honest, defender of truth, justice enforcement, courageous in upholding truth, justice and the well-being of society at large; (2) major blood ' Takku ' white blood makes a person appear as giver of goodness, peace, harmony and prosperity with high integrity who bequeathed the behavior of giving without taking. It means taking something as a konsekuaensi term, instead of the jabatnnya exploit to get something from the State and society.

Keywords: *To Manurung, politic culture, social structure.*

---

[1]Hasil Penelitian

[2]Staf Pendidik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jl. H.E. Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: rivai_nur@yahoo.co.id

A. PENDAHULUAN

Untuk mengangkat pokok-pokok pikiran masyarakat Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan yang telah mengkristal dalam ratusan tahun dan berkontribusi terhadap dinamika kehidupan sosial dan politik termasuk pemilihan pemimpin di daerah ini. Pokok-pokok pikiran tersebut dapat dicandra dan diangkat kepermukaan untuk dikembangkan menjadi kearifan lokal daerah ini.

Dalam kronik Mekongga, Konawe, Buton/Wolio, Bone, Luwu dan Gowa struktur sosial-politiknya tumbuh dari *To Manurung*. *To Manurung* melahirkan kelompok masyarakat "berdarah putih" (darah *takku*) dan kelompok masyarakat "berdarah merah".[3] *To Manurung* dipercaya membangun kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan Tenggara, seperti Mekongga, Konawe, Wolio, Luwu, Bone dan Gowa-Tallo. Proses politik yang dimulai dari *To Manurung* merupakan awal terbangunnya peradaban Tolaki-Wolio-Bugis-Makassar. Konsep ini dapat dilihat dari fakta sejarah bahwa hampir semua kerajaan atau sistem pemerintahan di Tolaki, Buton, Bugis, dan Makassar terbangun dari adanya perjanjian politik antara kelompok a*nang* (dewan) dalam wilayah pemukiman masing-masing w*anua* (negeri*)* untuk mengangkat *To Manurung* sebagai pemimpin atau raja mereka.

Terlepas dari berbagai perspektif mengenai mitos *To Manurung*, secara mendasar telah terjadi sebuah kontrak politik untuk membangun sebuah negara dengan sistem hukum, sistem sosial budaya yang disepakati bersama dan dipimpin oleh satu orang yang dianggap *capable* untuk mempersatukan dan menjaga mereka dari kondisi masyarakat yang kacau-balau kepada masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, diketengahkan pertanyaan masalah dalam penelitian ini, yakni; Mengapa *To Manurung* penting sebagai peletak dasar budaya politik masyarakat Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Dengan demikian dalam tulisan ini ditujukan untuk menganalisis *To Manurung* sebagai peletak dasar budaya politik masyarakat Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.

B. KERANGKA TEORI

Fenomena berdirinya kerajaan-kerajaan di daerah ini, seperti Mekongga, Konawe, Buton, Bugis dan Makassar jika dilihat dari perspektif ilmu politik maka akan menguatkan tesis Thomas Hobbes, dalam satu mazhab teori perjanjian masyarakat yang merupakan salah satu "mazhab teori" yang mendasari teori pembentukan negara. Latar belakang kondisi sosial pada masa Thomas Hobbes sangat sesuai dengan sejarah peradaban Mekongga, Konawe, Buton, Bugis dan Makassar saat itu. Mereka yang memiliki fisik yang terkuatlah yang menguasai setiap kelompok di masyarakat.[4] Keadaan ini disebut dengan kondisi yang *bellum omnium contra omnes* (perang antara semua melawan semua) atau dalam bahasa latin disebut sebagai *homo homini lupus* (manusia saling memakan sesama). Kondisi ini sesuai dengan apa yang tertulis di La Galigo, di mana kondisi masyarakat saat sebelum muncul *To Manurung* mengalami kondisi sosial yang disebut *sianre balé taué* (saling memangsa seperti ikan).

Kehadiran *To Manurung* sebagai sosok dengan berbagai kelebihan yang pada saat itu sangat bertepatan pada saat titik klimaks setiap kelompok yang bertikai untuk berhenti saling bertempur. Kehadiran *To Manurung* yang dikisahkan dengan begitu

[3] Christian Pelras, The Peoples of South – East Asia and the Pacific: The Bugis, Blackweel, 1996, Cambridge, Massachusetts, USA, page. 168

[4] G.H. Sabine, *Teori-Teori Plitik: Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya*, Cetakan Kedua, Bina Cipta, Bandung, 1992, hal. 118, Diterjemahkan dari Buku, *A History opolitical Theory*, Henry Holt and Company, New York,

dramatis dalam cerita rakyat dan *lontara'* turut mendukung kondisi yang "kebetulan" ini. Bermula, Matoa/Ulu Anang (pemimpin kelompok) dengan *To Manurung* membuat kesepakatan bersama atau perjanjian untuk bersama-sama menata masyarakat dengan suatu hukum atau *pangngadereng* dalam wilayah teritorial tertentu. Salah satu isi perjanjian yang penting adalah mengangkat *To Manurung* sebagai pemimpin tertinggi dan ditaati bersama. Pada tahap ini, *pactum subjectionis* telah terealisasi dalam masyarakat Mekongga, Buton, Bugis waktu itu.

Pengangkatan *To Manurung* melahirkan budaya hubungan manusia dalam suatu masyarakat yang berbentuk patron-klien. Ahimsa-Putra mengutip pendapat Scott yang menyatakan bahwa gejala patron-klien tetap berlaku di masyarakat pada masa lalu hingga sekarang khususnya di masyarakat Asia Tenggara, disebabkan oleh tiga kondisi pendukung.[5] Kondisi pertama adalah terdapatnya perbedaan (*inequality*) yang terjadi di masyarakat dalam hal kekayaan dan kekuasaan. Patron mendasarkan dirinya pada pengaturan kekuatan serta jalur mendapatkan jabatan. Bukan pada pewarisan kedudukan atau kepemilikan tanah. Kondisi ini berubah pada masa pemerintahan kolonial yang menerapkan komersialisasi ekonomi. Sehingga kepemilikan tanah kemudian menjadi pemicu munculnya gejala patron-klien.

Kondisi kedua ditandai dengan perbedaan penguasaan sumber daya yang kemudian tidak diikuti dengan adanya institusi yang dapat menjamin keamanan individu baik menyangkut status maupun kekayaan. Kondisi ini kemudian diperparah dengan kelangkaan sumber daya yang semakin membuat ketidakamanan fisik bertambah besar dan dampaknya sebagai akibat benturan beberapa kepentingan yang tidak dapat dihindari.

Hubungan patronase sebagai salah satu cara untuk mendapatkan keamanan menjadi pilihan jika keamanan sudah semakin terancam dan kontrol sosial tidak bisa dijadikan tempat perlindungan. Memilih untuk "dekat" pada orang yang lebih kuat dengan harapan dapat melindunginya dari ancaman merupakan solusi terbaik masa itu. Sehingga secara realitas ikatan-ikatan pribadi telah menggantikan peranan hukum, nilai-nilai bersama, dan institusi-institusi yang kuat.

Kondisi yang ketiga, jika ikatan-ikatan kekerabatan ternyata tidak dapat diandalkan sebagai satu-satunya cara untuk mencari perlindungan serta meningkatkan penguasaan sumber daya. Ketidakmampuan kelompok kekerabatan menjadi semakin berkurang sejak diberlakukannya sistem ekonomi baru oleh pemerintahan kolonial. Karena itu membina hubungan dengan orang-orang di luar kerabat merupakan tindakan yang dapat lebih efektif untuk memperoleh kekayaan, status dan kekuasaan.

Ketiga kondisi pendukung tersebut mendeskripsikan kepada kita situasi yang melatarbelakangi hubungan patron-klien yang dianut oleh masyarakat Bugis yang biasa disebut *Ajjoareng-Joa'*. Dalam masyarakat Bugis patron biasanya diduduki oleh kalangan bangsawan yang disebut *Ajjoareng atau Pappuangeng*. Sedangkan klien yang berasal dari kalangan masyarakat biasa disebut *joa* 'atau *ana' guru* (pengikut).[6] Hubungan patron dan klien merupakan hubungan kewajiban timbal-balik. Seorang patron berkewajiban untuk melindungi *joa*'nya dari kesewenang-wenangan dari bangsawan lain, pencurian, atau berbagai ancaman lain, serta memperhatikan kesejahteraan dan melindungi mereka dari kemiskinan. Sebaliknya, klien berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada patronnya, misalnya, dengan bekerja di lahan atau rumah tuannya, atau menjadi prajurit,

[5] Heddy Shri Ahimsa Putra, *Op-Cit*, hal 33.

[6] *Ibid.*

dan mengerjakan berbagai kegiatan-kegiatan lainnya.

Dalam sistem politik orang Konawe, Buton, Makassar, dan Bugis tradisional, garis keturunan bukanlah jaminan untuk mendapatkan posisi jabatan politik. Tidak ada aturan mutlak yang dapat dijadikan pedoman dalam proses suksesi suatu kerajaan. Namun terdapat sebuah petunjuk yang menggariskan bahwa untuk jabatan tertentu, calon yang akan dipilih biasanya mesti salah seseorang dari sekian banyak keturunan pemegang jabatan sebelumnya, dan dia sendiri berasal dari status tertentu saja. Jadi, biasanya terdapat beberapa kandidat yang memiliki hak yang kurang lebih sama untuk berkompetisi dalam suksesi tersebut. Faktor utama yang dapat memenangkan adalah kandidat yang memiliki pengikut paling banyak serta didukung oleh pengikut yang paling berpengaruh. Secara mendasar, pengikut (*joa'*) dapat dibedakan dua jenis yaitu dari kalangan biasa dan kalangan bangsawan. Pertama, pengikut dari kalangan orang biasa mengabdi langsung kepada *joa'*nya misalnya menjadi prajurit dalam pasukannya. Kedua, adalah pengikut dari kalangan bangsawan yang menjadi pendukung, yang juga memiliki pengikut dan pendukung sendiri.[7]

Berangkat dari fenomena tersebut di atas, maka seorang patron harus berupaya untuk memperluas jaringan kliennya. Terdapat beberapa cara untuk membangun dukungan jaringan klien. Cara pertama adalah dengan menunjukkan kedermawanan dan membangkitkan rasa hormat dari kalangan pengikut dengan melindungi dan menjaga kesejahteraan mereka lebih baik dibanding yang lain. Cara lain adalah dengan membangkitkan kebanggaan pengikut dan harapan akan masa depan yang lebih baik dengan menduduki jabatan tinggi atau tampak sebagai orang yang paling berpeluang untuk menduduki jabatan tersebut. Pengikut pada gilirannya akan merasa ikut terhormat, dan berharap memperoleh keuntungan dari jabatan pemimpinnya, karena dengan memegang jabatan tersebut dapat meningkatkan peluang patron mereka untuk mendistribusikan kembali kekayaan yang diperolehnya. Cara yang ketiga adalah melalui "perkawinan politik" yaitu dengan menikahi keturunan atau keluarga bangsawan yang memiliki *joa'* yang banyak serta pendukung yang berpengaruh atau kharismatik.[8] Kelompok bangsawan dalam pola hubungan patron-klien tetap tampil sebagai patron yang melindungi kliennya, dan terus berusaha menjaga kemurnian *darah putih*nya atau kebangsawannya. Meskipun demikian, perkawinan antar *darah putih* dan *darah merah* tetap berlangsung sehingga melahirkan bangsawan campuran.

Dominasi kelompok bangsawan berkurang dengan berperannya kelompok baru yang berasal dari elit tentara, pendidikan, dan ekonomi. Walaupun kehadiran elit-elit baru itu tak mampu menggeser pengaruh kaum bangsawan, baik karena ia tampil sebagai patron dalam hubungan patronase, maupun karena tampil sebagai pemimpin militer dan politik. Hal itu dimungkinkan terjadi oleh karena sebagian besar dari kelompok baru berasal dari kelompok bangsawan, baik bangsawan *berdarah murni* maupun bangsawan berdarah campuran.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif tipe strukturis. Penelitian ini menekankan pada dua hal; gejala sosial budaya dan materi. Pertama. Gejala yang diteliti merupakan gejala sosial budaya yang dinamis dengan kreativitas individu, kelompok, dan lembaga, mencoba mencandra pemikiran dan tindakan mengalami perubahan secara nyata. Dasar asumsinya, bahwa perubahan lebih disebabkan oleh gejala internal yang dipengaruhi gejala

[7] *Ibid.*

[8] *Ibid.*

eksternal. Obyektivitas dari gejala itu lebih memungkinkan dipahami secara lebih baik melalui pengungkapan pemikiran dan tindakan yang bersifat strukturalis di mana agen berperang penting dalam memberi informasi pemikiran dan pemaknaan terhadap tindakan-tindakan mereka. Kedua. *Subject matter* (materi) dalam penelitian ini adalah proses dari suatu gerangan dan sistem yang hanya ditunjukkan oleh gejala-gejala berupa pemikiran dan tindakan.

Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, peneliti mengumpulkan data dokumen di Arsip Nasional Pusat di Jakrta dan Arsip Nasional Wilayah di Makassar. Teknik analisis data yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data; (3) penyajian; dan (4) verifikasi data.

D. MENCANDRA *TO MANURUNG* SEBAGAI PELETAK DASAR BUDAYA POLITIK SULAWESI TENGGARA DAN SULAWESI SELATAN

Kondisi politik daerah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan sebagai bagian dari negara baru dan terus berkembang hingga saat ini, yakni Indonesia tak dapat dilepaskan daripada proses merajuk tradisionalisme-tradisionalisme yang terbungkus dalam kelas-kelas sosial menjadi nasionalisme Indonesia. Hal itu sebagai konsekuensi dari negara baru dan daerah-daerah yang baru sungguh-sungguh mendapatkan wewenang yang luas dalam pemerintahan, yang cenderung menjadi tumpukan tradisi-tradisi yang bersaing dan terkumpul menjadi kerangka-kerangka kerja politis yang lebih direka daripada secara organis memperkembangkan peradaban-peradaban. Seperti diketahui bahwa di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara terdapat keanekaragaman kebudayaan besar dan kompleks telah berlangsung berabad-abad lamanya.

Dalam paradoks yang mencolok, gerakan ke arah kesatuan nasional mengintensifkan ketegangan-ketegangan kelompok di dalam masyarakat Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Hal itu menimbulkan bentuk-bentuk kultural yang tetap dari konteks-konteks khusus Sulawesi Selatan, meluaskan bentuk-bentuk itu menjadi ikatan-ikatan umum, dan mempolitisir bentuk-bentuk itu. Kemudian berkembang menjadi gerakan nasionalis dan menjadi aliran-aliran. Pada masa *Post Revolutioner*, aliran-aliran ini menjadi partai-partai, masing-masing mempromosikan segi yang berbeda dari tradisi eklektik sebagai satu-satunya dasar identitas Indonesia.

Dinamika dari perjuangan partai-partai adalah berusaha menyesuaikan diri dengan tren nasional dan dunia yaitu kebebasan dan demokratisasi. Hal itu merupakan upaya memunculkan sebuah daya tarik modernis di atas dasar tradisionalistisnya. Daya tarik modernis dalam masyarakat industri berpengaruh terhadap masyarakat yang menerima gaji dan yang bergerak dalam perdagangan dan industri. Kelompok ini mengusulkan sebuah perkawinan yang menyenangkan antara spritualitas Timur dan gelora Barat, antara kebijakan dan teknik yang dengan cara itu memelihara nilai-nilai yang berharga sambil berusaha merubah basis material masyarakat yang telah menghasilkan nilai-nilai tersebut. Bagi orang-orang saleh, daya tarik modernis itu adalah pembaruan yang sebenarnya cukup bersifat religius, sebuah usaha untuk merenovasi peradaban Islam sedemikian rupa sehingga memperoleh kembali kehilangannya, kepemimpinan yang benar dalam kemajuan moral, material, dan intelektual umat Islam. Kemudian, kelompok populis, daya tarik modernis adalah komunisme dan Partai Komunis Indonesia, yang melihat tradisi radikal asli dalam kolektivisme dan egalitarianisme sosial menjadi jurubicara utama untuk esensialisme petani, maupun untuk suatu epokhalisme revolusioner yang menyangkut munculnya massa. Tetapi, dalam upaya itu baik perjuangan populis, pertemuan Timur dan Barat mau-

pun kebangkitan kultural Islam tak dapat diwujudkan hingga dikeluarkannya UU No. 29 tahun 1959 yang membubarkan pemerintahan swapraja.

Paling kurang ada dua hal yang mempengaruhi pemilu untuk menghasilkan pemimpin daerah berintegrasi dapat disorot terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum. Pertama, kondisi kepartaian yang belum sepenuhnya terlepas dari politik aliran, seperti pemilihan umum tahun 1955 yang dinilai pemilu yang demokratis. Pada pemilu itu Masyumi memperoleh suara terbanyak tetapi gagal membangun koalisi. Kegagalan Masyumi dalam membangun koalisi untuk mendapatkan suara mayoritas disebabkan oleh:

1. Di dalam DPRDSS/DPRDS terdapat 3 (tiga) kelompok berdasarkan aliran yakni: aliran agama, nasionalis, dan populis.
2. Di dalam DPRDSS/DPRDS selain memiliki kesamaan dalam kepentingan yaitu membangun Indonesia, juga memiliki perbedaan kepentingan yaitu otonomi yang luas, menolak dominasi Suku Jawa dalam pemerintahan dan militer, sebaliknya berusaha menampilkan aktor-aktor lokal yang diperjuangkan oleh partai-partai lokal. Atas dasar kepentingan itu terbentuk dua kategori partai, yaitu: (a) partai lokal yakni partai-partai yang hanya ada di daerah saja dan partai-partai nasional yang pusat berada di Jakarta, (b) partai-partai kecil dan partai-partai besar (memiliki banyak cabang dan anggota).
3. Partai-partai pendukung kelompok unitaris dan partai-partai yang mendukung federalis.

Kedua, pengaruh elit politik yang kuat dalam mengendalikan partai-partai. Jika pemilu tahun 1955 hanya ”bangsawan patron” yang berpengaruh, sekarang bertambah yaitu elit sosial, ekonomi dan penguasa.

Elit baru yang dimaksud menampilkan diri seperti dengan bangsawan patron yang memiliki banyak klien dan jaringan patron yang solid dan mengendalikan partai-partai dari luar bahkan dapat mengendalikan militer. Situasi seperti itu dapat diminimalisir melalui dua hal pula, yaitu: (1) menggali dan mengembangkan karakter dan gaya kepemimpinan yang bersumber dari falsafah "Sulapa Eppa" (Mattulada, 1995, Pelras, 1996, Nur, 2007) (2) Mencandra dan merefleksikan pada diri calon anggota dewan dan pemimpin daerah *To Manurung* yang berdarah *takku* sebagai sumber pembentukan budaya lokal di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.

Pertama, karakter dan gaya kepemimpinan bersumber dari falsafah *Sulapa Eppa*. Menurut Darmawan (1988), Mattulada (1995), dan Pelras (1996), raja dan pemerintah kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tenggara memerintah berdasarkan etika pemerintahan yang disebut *sulapa' appa'* (empat penjuru tetapi bukan penjuru angin, melainkan kearifan, yaitu: *gettang* (lurus, jujur), *tongang* (kebenaran, benar), *warani* (berani), dan *adele* (adil)). Kemudian, di tengah *sulapa appa* didirikan *siri'* dan *pesse*. Seorang pemimpin *masiri'* kalau tidak jujur atau lurus dalam menjalankan pemerintahan. *Masiri'* kalau memerintah tidak benar dan menegakkan kebenaran dalam menjalankan pemerintahan. *Masiri*' kalau tidak tegas dan berani melindungi dan mensejahterakan rakyatnya dalam menjalankan pemerintahan. *Masiri'* kalau tidak dapat berlaku adil di dalam menjalankan pemerintahan. Ketika seorang memimpin menjalankan *sulapa appa* dalam pemerintahannya dan mendapat perlakuan yang membuat yang bersangkutan direndahkan martabat maka *rapu* (rumpun) dari seseorang yang telah direndahkan tadi akan *masseddi siri'* (rumpun itu membela kehormatan saudara se-*rapu*-nya. Selanjutnya, *masseddi siri* berkembang menjadi *pesse*. Pembelaan kehormatan se-*rapu* dan jaringan *rapu*-nya. Jadi, pada dasarnya seorang pemimpin di

Sulawesi Tenggara malu kalau tidak jujur, tidak berbuat yang benar, tidak berani, mengedepankan kebenaran dan keadilan. Etika ini berlaku pula di dalam kehidupan sosial.

Etika *Sulapa' Appa'* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kerajaan/Swapraja di Sulawesi Tenggara

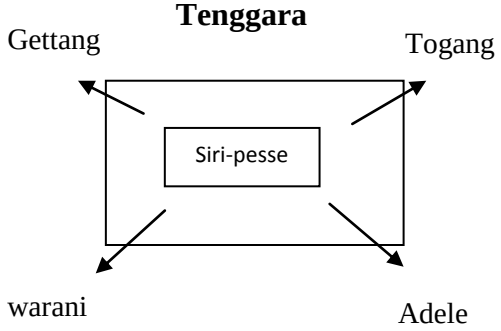

Dengan memperhatikan ikrar pengangkatan raja, hukum-hukum dasar penyelenggaraan negara dan etika *sulapa' appa'* dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat menunjukan indikasi kerajaan-kerajaan/swapraja-swapraja di Sulawesi Tenggara menjalankan pemerintahan berdasarkan azas demokrasi.

Kedua, di daerah ini terbangun pemikiran (budaya) bahwa orang Sulawesi Tenggara mewarisi darah Takku atau "darah putih" bukan *"darah biru"* seperti halnya di kawasan barat Indonesia. Orang *berdarah takku* dipercaya memiliki berbagai kelebih-an/keutamaan dari orang yang lainnya, seperti kecakapan, kejujuran, kearifan. Kelebihan/keutamaan ini terefleksi dalam perilaku dan tindakan, seperti tampak pada sikap penolong, pelindung, pengayom yang "memberi tidak mengambil" yang mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, keluarga kelompok dan partainya. seseorang yang misinya mengangkat kesejahteraan, ketentraman, kedamaian masyarakat luas. Sedangkan *darah biru* lebih terlihat pada perilaku mengambil daripada memberi. Saat ini, perilaku darah biru lebih banyak mewarnai politisi dan pemimpin kita daripada perilaku *darah takku*.

E. PENUTUP

Berdasarkan uraian dalam bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan dapat menghasilkan legislator dan birokrat yang handal untuk mendorong kemajuan daerah ini ke depan dengan mencandra kearifan lokalnya yang telah mengkristal masa lalu tetapi saat ini memudar bahkan cenderung ditinggalkan oleh sebagaian orang Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.

Etika politik *Sulapa Eppa* yang mewariskan karakter dan gaya kepemimpinan: jujur, penegak kebenaran, pembela keadilan, berani dalam menegakkan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan masyarakat luas.

Falsafat darah *Takku - darah putih* yang menjadikan seseorang tampil sebagai pemberi kebaikan, kedamaian, ketentraman dan kesejahteraan dengan integritas yang tinggi yang mewariskan perilaku memberi tanpa mengambil. Artinya mengambil sesuatu sebagai konsekuensi jabatannya, bukan mengekploitasi jabatnnya untuk mendapatkan sesuatu dari negara dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Duverger, Maurice, 1996, *Sosiologi Politik*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Diterjemahkan oleh Daniel Dhakidae, dari Buku The Study of Politics.

Geertz, Clifford, 1992, *Politik Kebudayaan: Refleksi Budaya*, Yogyakarta, Kanisius, Diterjemahkan dari Buku The Intrpretation of Culture: Selected Essays, London, Hutchinson & Co Publisher.

Heddy Shri, A, P., 1988, *Minawang Hubungan Patron Klien di Sulawesi Selatan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.

Miles, Matthew B and A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data*

Kualitatif, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, diterjemahkan oleh Tjepjep Rohendi Rohhidi Judul Asli *Qualitative Data Analysis*.

Mattulada, 1995, *Latoa*, Ujung Pandang, Universitas Hasanuddin.

Nur, Rifai, 2007, *Otonomi Daerah: Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaannya di Sulawesi Selatan 950-1959*, Disertasi yang tidak diterbitkan, Universitas Indonesia.

Pelras, Christian, 1996, *The Bugis*, Amerika, Blackwell Publisher.

Rahman, Darmawan Mas'ud, 1988, *Puang dan Daeng Kajian Sistem Nilai Budaya Orang Balannipa Mandar*, Makassar, Universitas Hasanuddin.

Sabine, George H, 1992, *Teori-Teori Politik 2*, Bandung, Binacipta.

PETUNJUK PENULISAN NASKAH

Naskah yang dikirim ke Redaksi Jurnal Etnoreflika harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Naskah belum pernah dipublikasikan oleh media cetak lain.
2. Naskah berupa hasil penelitian, gagasan konseptual, kajian dan aplikasi teori tentang fenomena sosial dan budaya.
3. Naskah diketik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris pada kertas A4 dengan huruf *Times New Roman* 12 spasi 1,5. Margin atas 4 cm,kanan 3 cm, kiri 3 cm dan bawah 3 cm . Jumlah halaman 10-20 halaman di luar daftar pustaka dan tabel.
4. Sistematika penulisan naskah, yaitu: (a) judul naskah; (b) nama penulis (tanpa gelar akademik); (c) asal institusi dan alamat, telepon, fax, atau email (d) abstrak (maksimum 100-150 kata) dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia; (e) kata kunci (2-5 kata); (f) pendahuluan (tanpa judul subbab) yang memuat latar belakang, masalah, tujuan penulisan, kerangka teori; (g) metode penelitian (jikanaskahmerupakanhasilpenelitian); (h) pembahasan yang disajikan dalam subbab; (h) penutup; (i) daftar pustaka.
5. Daftar Pustaka dan sumber lainnya disusun secara alfabetis dan kronologis dengan mengikuti tata cara sebagai berikut.

   Spradley, James. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana. (rujukan buku)

   Hill, Erica. 1998. Gender-Informed Archaeology: The Priority of Definition, The Use of Analogy, and The Multivariate Approach" dalam *Journal of Archaeological Method and Theory,* Vol. 5, No. 1. (rujukan jurnal ilmiah)

   Hugo, Graeme J. *et al.* 1987. *The Demographic Dimension In Indonesian Development*. New York: Oxford University Press.(Rujukan buku dengan 4 pengarang atau lebih)

   Landa, Apriani. 17 Juli 2008. "Tekad Siswa Bersih Narkoba" dalam *Tribun Timur*: hlm 14. (rujukan surat kabar/majalah).

   Parsudi, Suparlan. 2008. *Struktur Sosial, Agama, dan Upacara. Geertz, Hertz, Cunningham, Turner, dan Levi-Strauss*. Online. (http://prasetijo.wordpress.com/2008/10/09/struktur-sosial-agama-dan-upacara-geertz-hertz-cunningham-turner-dan-levi-strauss). Diakses pada tanggal 21 Januari 2009. (rujukan in-ternet)
6. Naskah dikirim dalam bentuk print out disertai file dalam compact disk (CD) atau flash disk dengan menggunakan pengolah data *Microsoft Word* ke alamat redaksi.
7. Redaksi membuka kesempatan bagi siapa saja (peneliti, dosen, guru, dan tenaga profesional lain) untuk mengirimkan naskah.
8. Kepastian pemuatan/penolakan naskah akan diinformasikan secara tertutup melalui pos atau e-mail. Naskah yang dimuat tidak dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.
9. Redaksi mempunyai kewenangan mengatur waktu penerbitan dan format penulisan sesuai petunjuk penulisan naskah Jurnal Etnoreflika.
10. Biodata penulis ditulis dalam lembar tersendiri.

Alamat Redaksi

Laboratorium Jurusan Antropologi
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Halu Oleo
Kampus Hijau Bumi Tri Dharma
Jalan H.E, Agus Salim Mokodompit Kendari 93232
Telepon/Fax. (0401) 3195123, e-mail: jurnaletnoreflikaunhalu@gmail.com

JURNAL ETNOREFLIKA
JURUSAN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HALU OLEO
Kampus Hijau Bumi Tridharma
Jalan H.E, Agus Salim Mokodompit Kendari 93232
Telepon/Fax. (0401) 3195123, e-mail: jurnaletnoreflikaunhalu@gmail.com